

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Priyatmanto, *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Abdullah, Rozali, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Asshidiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Basah, Sjachran, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Hadjon, Philipus M, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Hanitjo Soemitro, Rony, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indah, Jakarta, 1988.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hutagalung, Arie S, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Marbun, S.F, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Riawan Tjandra, W, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Santoso, Urip, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.
- Setiadi, Wicipto, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Perbandingan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Soewondo, Slamet Sampurno, *Eksistensi Hakim Dalam Penegakan Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Wijayanta, Tata, dan Firmansyah, Hery, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Wiyono, R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Yanto, Nur, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Teori dan Praktiknya di Pengadilan Tata Usaha Negara)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Jurnal dan lain-lain

- Harsono, Boedi, Aspek Yuridis Penyediaan Tanah, *Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN*, Nomor 2 Tahun XX, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.
- Manan, Bagir, *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Nomor 253, Jakarta, 2006.

Rakhman, Fedi Arif, *Dissenting Opinion* Hakim Majelis Dalam Putusan Mahkamah Agung Mengenai Kasus Pencurian Piring, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012.

Santoso, Urip, Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan, *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.

Sunarmi, *Dissenting Opinion* Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2016/PTUN.JKT